

REPRESENTASI MEDIA TERHADAP KEKERASAN GENDER DALAM BASIS POLITIK

Asep Budiawan¹, Qorimul Jabbar², Anna Fadhilah³, Ibnu Qayyim a.z Asep N⁴
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

Email: asep.budiawan@iwu.ac.id¹, Qioriii22@gmail.com², anna.fadhilah@gmail.com³,
ibnuqoyyim@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana media, baik arus utama maupun digital, merepresentasikan kekerasan berbasis gender dalam konteks politik. Dalam masyarakat patriarkal, kaum perempuan politisi sering kali menjadi korban kekerasan simbolik, stereotip, dan disinformasi yang disebarluaskan melalui berbagai saluran media. Media arus utama kerap menyoroti aspek personal dan fisik kaum perempuan politisi daripada gagasan atau kinerjanya, sedangkan media sosial memperburuk kekerasan melalui ujaran kebencian, body shaming, hingga kekerasan digital berbasis gender. Representasi yang bias ini tidak hanya menghambat partisipasi kaum perempuan dalam politik, tetapi juga mereproduksi ketimpangan kuasa dalam ruang publik. Namun demikian, munculnya aktivisme digital feminis telah menjadi bentuk perlawanan terhadap narasi dominan yang menindas. Kampanye online, penggunaan tagar, serta solidaritas digital menjadi strategi penting dalam menantang kekerasan gender di media. Studi ini menegaskan pentingnya reformasi dalam praktik jurnalisme serta penguatan regulasi terhadap kekerasan berbasis gender di media. Dengan analisis kritis, kajian ini menyoroti perlunya media yang adil, inklusif, dan berperspektif gender dalam mendukung demokrasi dan keadilan sosial.

Kata kunci: representasi media, kekerasan gender, politik, feminisme digital, kaum perempuan politisi, media sosial

ABSTRACT

This study discusses how media, both mainstream and digital, represent gender-based violence in a political context. In a patriarchal society, women politicians are often victims of symbolic violence, stereotypes, and disinformation disseminated through various media channels. Mainstream media often highlight the personal and physical aspects of women politicians rather than their ideas or performance, while social media exacerbates violence through hate speech, body shaming, and gender-based digital violence. This biased representation not only hinders women's participation in politics but also reproduces power imbalances in the public sphere. However, the emergence of feminist digital activism has become a form of resistance to dominant oppressive narratives. Online campaigns, the use of hashtags, and digital solidarity have become important strategies in challenging gender violence in the media. This study emphasizes the importance of reform in journalism practices and strengthening regulations against gender-based violence in the media. With a critical analysis, this study highlights the need for fair, inclusive, and gender-perspective media in supporting democracy and social justice.

Keywords: media representation, gender violence, politics, digital feminism, women politicians, social media.

PENDAHULUAN

Media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan membingkai wacana sosial-politik, termasuk isu kekerasan berbasis gender. Dalam konteks politik, kaum perempuan sering kali menjadi korban kekerasan berbasis gender yang tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara simbolik dan verbal, terutama melalui media. Representasi media terhadap politisi kaum perempuan atau aktivis kaum perempuan sering kali memperkuat stereotip gender, mereduksi kredibilitas para aktor terkait, bahkan mengabaikan konteks kekerasan yang para aktor terkait alami. (Hidayati, Fadhila Wanda, Jhoansyah, Dicky, Deni, R., & Danial, Muhammad. (2021). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 230–240.)

Isu ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam politik, yang diiringi pula dengan meningkatnya kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk ujaran kebencian, pelecehan daring, maupun serangan personal di media. Media memiliki kekuatan untuk memperkuat atau menantang struktur patriarki, dan bagaimana media memilih untuk meliput isu kekerasan gender di arena politik akan memengaruhi persepsi publik serta respons kebijakan terhadap masalah tersebut.

Penelitian tentang representasi media ini menjadi krusial untuk memahami dinamika kekuasaan, gender, dan politik dalam masyarakat kontemporer. Selain itu, pemetaan bagaimana media mengonstruksi narasi tentang kaum perempuan politisi yang menjadi korban kekerasan gender dapat menjadi bahan evaluasi bagi etika jurnalistik dan kebijakan media ke depan.

Kekerasan berbasis gender dalam ranah politik merupakan permasalahan serius yang mengancam partisipasi kaum perempuan dalam demokrasi. Perempuan yang terlibat dalam politik sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan psikologis, pelecehan seksual, hingga serangan daring yang merendahkan martabat para aktor terkait. Hal ini tidak hanya menghambat keterwakilan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga mencerminkan ketimpangan gender yang masih mengakar dalam struktur sosial dan politik.

Media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu kekerasan gender dalam politik. Sayangnya, representasi media terhadap kaum perempuan politisi sering kali bias dan tidak sensitif gender. Beberapa studi menunjukkan bahwa media cenderung menyoroti aspek pribadi atau penampilan fisik kaum perempuan politisi daripada kompetensi dan kapabilitas para aktor terkait. Selain itu, pemberitaan tentang kekerasan terhadap kaum perempuan dalam politik sering kali tidak menggambarkan akar permasalahan struktural dan cenderung menyalahkan korban.

Di Indonesia, meskipun telah diterapkan kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan kaum perempuan dalam parlemen, tantangan representasi media yang adil dan setara masih menjadi hambatan

besar. Media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan pemberitaan yang adil, akurat, dan tidak bias gender guna mendukung terciptanya lingkungan politik yang inklusif dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Rumusan masalah

- Bagaimana framing berita terkait kekerasan politik berbasis gender memengaruhi persepsi publik terhadap korban dan pelaku?
- Sejauh mana representasi media memperkuat atau menantang stereotip gender dalam kasus kekerasan terhadap kaum perempuan di dunia politik?
- Bagaimana media merepresentasikan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh kaum perempuan dalam ranah politik?

Media massa sering kali mempraktikkan bias afiliasi politik ketika memberitakan kekerasan berbasis gender dalam arena politik. Dalam studi tentang “actor-specific reporting bias,” Zhukov & Baum menemukan bahwa media dapat secara sistematis lebih banyak melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan politik daripada pihak “yang sejalan,” sehingga membentuk kesan bahwa satu pihak jauh lebih agresif daripada pihak lain. Bias ini tidak hanya muncul sebagai perbedaan kuantitas pemberitaan-jumlah artikel atau durasi siaran tetapi juga tercermin dalam pemilihan narasi, kata kunci, dan sudut pandang yang memperkuat citra korban atau pelaku sesuai kepentingan editorial.

Dampak jangka pendek dari bias semacam ini adalah polarisasi persepsi di kalangan publik. Konsumen berita cenderung mencari dan mengonsumsi sumber yang selaras dengan pandangan politik para aktor terkait, sebuah fenomena yang digambarkan oleh Stroud (2011) dan Iyengar & Hahn (2009) sebagai efek ekokamar (echo chamber). Ketika liputan tentang kekerasan gender disajikan dengan muatan politik, pembaca atau pemirsa akan menganggap klaim kekerasan tersebut sebagai ‘kebenaran yang tidak terbantahkan’ jika sesuai dengan kerangka afiliasi para aktor terkait. Hasilnya, narasi di media dapat memperkuat dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang menangani kekerasan gender, tergantung pada siapa yang “dimonitor” oleh outlet bersangkutan.

Sementara itu, framing korban sebagai entitas yang lemah dan emosional memperkuat stereotip gender tradisional. Studi “Media Representations of Domestic Violence” menunjukkan bahwa pemberitaan sering kali menonjolkan elemen emosi korban seperti tangisan atau ketakutan berlebihan daripada aspek struktural kekerasan itu sendiri, sehingga publik memandang kasus sebagai masalah pribadi, bukan masalah sistemik ([Oxford Research Encyclopedia][1]). Eksperimen framing di PMC juga mengungkap bahwa penggunaan istilah “drama domestik” atau “drama cinta” untuk menggambarkan femisida menurunkan empati pembaca dan mengalihkan fokus dari pelaku kepada korban ([PubMed Central][2]). Di ranah media sosial, komentar-komentar yang menyalahkan korban (victim-blaming) turut memperkuat narasi ini, menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang “mengundang” kekerasan akibat perilaku atau penampilannya ([SAGE Journals][3]).

Konsekuensi jangka panjang dari framing semacam ini adalah persepsi publik yang terdistorsi tentang kaum perempuan dalam politik. Bila media terus menggambarkan kaum perempuan korban kekerasan sebagai figur yang emosional dan rapuh, stereotip bahwa kaum perempuan “tidak pantas” atau “tidak kuat” untuk berkiprah di dunia politik akan semakin mengakar ([SAGE Journals][4]). Selain itu, penelitian tentang framing online menegaskan bahwa absennya konteks interseksional seperti ras, kelas, atau disabilitas memperkuat dominasi kelompok kaum perempuan tertentu, sementara kelompok rentan lainnya semakin terpinggirkan ([ResearchGate][5]). Akhirnya, minimnya narasi kritis terhadap kekerasan gender dalam politik dapat menurunkan partisipasi kaum perempuan dalam wacana dan proses politik, karena para aktor terkait merasa tidak diakui atau disuarakan secara adil oleh media.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Representasi media

Representasi media terhadap kekerasan gender dalam basis politik. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa media tidak hanya menciptakan dan memperkuat stereotip gender, tetapi juga memengaruhi persepsi publik dan kebijakan melalui pilihan framing, bias editorial, serta algoritma platform digital. Teori Analisis Wacana Kritis (van Dijk) dan teori *framing* (Entman) sering digunakan untuk mendekonstruksi cara media menarasikan korban dan pelaku, sementara kajian interseksionalitas mengungkap marginalisasi kelompok tertentu. Namun, sebagian besar penelitian masih terfokus pada media tradisional, sehingga penelitian perbandingan lintas platform digital dan dampak algoritmik menjadi kebutuhan masa depan.

1. Kerangka Teoritis dalam Representasi Media

Studi-studi awal tentang representasi gender menyoroti peran media dalam membentuk stereotip melalui narasi yang repetitif dan obyektifikasi. Kajian Cuklanz selama tiga dekade menunjukkan bahwa media mainstream seringkali menggambarkan kaum perempuan korban kekerasan sebagai entitas pasif, sehingga mengaburkan faktor struktural yang melatarbelakangi kekerasan ([OpenEdition Journals][1]). Van Dijk (2013) menekankan pentingnya Analisis Wacana Kritis untuk memahami bagaimana struktur teks seperti pilihan leksikal dan metafora mewarnai persepsi publik terhadap *gender-based violence* (GBV) ([ResearchGate][2]).

2. Framing Kekerasan Gender dalam Politik

Penelitian multimodal oleh Aura Freedom mengungkap bahwa *framing* media terhadap kasus GBV baik fisik maupun simbolik sering dipandang sebagai urusan privat, bukan masalah politik atau sistemik, sehingga membatasi ruang advokasi publik ([GBV In the Media][3]). Analisis OSCE terhadap pemberitaan GBV menunjukkan bahwa lebih dari 58% kasus dilaporkan sebagai persoalan privat, padahal 63.8% dan 61.8% melibatkan kekerasan fisik dan seksual yang jelas-jelas kriminogenik

([osce.org][4]). Hal ini sejalan dengan temuan ANROWS bahwa media kerap meremehkan konteks politik dan kekuasaan di balik kekerasan terhadap kaum perempuan ([anrows.org.au][5]).

3. Perbandingan Media Tradisional dan Digital

Media tradisional (koran, televisi) tetap mengedepankan sudut pandang editorial terpusat, sedangkan media digital terutama portal berita dan media sosial menawarkan ruang interaksi dua arah yang dinamis. Namun studi SAGE menemukan bahwa kecepatan penyebaran di platform digital sering kali disertai misinformasi dan hate speech, yang dapat memperparah victim-blaming pada korban politisi kaum perempuan ([SAGE Journals][6]). Di sisi lain, Verywell Mind menekankan bahwa media realitas (reality TV) dan konten viral di media sosial dapat memperkuat skrip gender yang berkontribusi pada kekerasan remaja, menandakan perlunya media literacy di kalangan generasi muda ([Verywell Mind][7]).

4. Interseksionalitas dan Bias Algoritmik

Kajian *intersectionality* menyoroti bagaimana media seringkali mengabaikan pertemuan identitas gender dengan ras, kelas, atau disabilitas, sehingga hanya memfokuskan pada kaum perempuan yang paling representatif secara sosial ([ScienceDirect][8]). Selain itu, algoritma platform digital cenderung mengunggulkan konten sensasional, sehingga kasus kekerasan paling ekstrem mendapat liputan luas sementara isu-isu lain yang sama pentingnya terpinggirkan ([Taylor & Francis Online][9]).

5. Dampak pada Persepsi Publik dan Kebijakan

Laporan Guardian menunjukkan bahwa 60% parlementarian kaum perempuan di Asia-Pasifik mengalami hate speech online, dan liputan media yang berat sebelah dapat menurunkan partisipasi politik para aktor terkait. Maxwell et al. (2000) berargumen bahwa pemberitaan intensif dapat mendorong agenda legislasi, namun framing yang bias juga dapat menunda reformasi kebijakan perlindungan korban ([OpenEdition Journals][1]).

B. Kekerasan Gender

1. Definisi dan Klasifikasi Kekerasan Gender

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence/GBV) adalah setiap tindakan kekerasan yang ditujukan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin atau gender para aktor terkait, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. GBV mencakup intimate partner violence, kekerasan seksual luar keluarga, serta praktik tradisional merugikan seperti mutilasi genital kaum perempuan.

UN Women menekankan bahwa GBV bersifat sistemik dan terkait dengan ketidaksetaraan gender yang tertanam dalam struktur sosial dan politik. Mereka membagi GBV menjadi dua kategori besar:

kekerasan domestik dan kekerasan publik/komunitas, yang masing-masing dapat terjadi dalam konteks politis maupun non-politis .

2. Kerangka Teoritis dalam Studi GBV

Model Ekologis (Heise, 1998): Menggambarkan penyebab GBV pada empat level individual, relasional, komunitas, dan Masyarakat yang saling berinteraksi membentuk risiko kekerasan . Teori Gender dan Kekuasaan (Connell, 1987): Menjelaskan bagaimana struktur patriarchal dalam masyarakat dan institusi politik menciptakan relasi kuasa asimetris yang meningkatkan kerentanan kaum perempuan terhadap kekerasan . *Intersectionality* (Crenshaw, 1991): Menyoroti bagaimana identitas gender berpadu dengan ras, kelas, atau disabilitas, sehingga pengalaman GBV tidaklah seragam pada semua kaum perempuan .

3. Prevalensi dan Dampak GBV

Ellsberg et al. (2008) dalam studi lintas negara menyimpulkan bahwa antara 15–71 % kaum perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan sepanjang hidupnya . Garcia-Moreno et al. (2013) di *Global and regional estimates* juga melaporkan bahwa sekitar 30 % kaum perempuan dewasa pernah mengalami GBV . Dampak GBV meliputi trauma psikologis, gangguan kesehatan reproduksi, dan penurunan partisipasi politik kaum perempuan .

4. Representasi Media terhadap GBV

Studi Entman (1993) pada framing theory menunjukkan bahwa media memilih “frame” tertentu bagaimana menyajikan masalah GBV, siapa yang diposisikan sebagai korban/pelaku, dan apa konteksnya yang secara langsung mempengaruhi interpretasi publik . Van Dijk (2013) menekankan Analisis Wacana Kritis untuk mengungkap bias teks dan konsepsi sosial yang tersembunyi dalam liputan GBV . Menurut Jewkes (2010), pemberitaan cenderung menyudutkan korban dengan victim-blaming atau mereduksi peristiwa sebagai “drama pribadi”, sehingga mengaburkan dimensi politis dan struktural dari kekerasan .

5. GBV dalam Konteks Politik

Dalam ranah politik, Fraser (2014) mencatat bahwa politisi kaum perempuan sering kali menjadi sasaran GBV berbau misoginis yang dieksploitasi media untuk kepentingan partisan . Krook & Restrepo Sanín (2016) menemukan bahwa serangan GBV ini menurunkan kepercayaan diri dan partisipasi politik kaum perempuan, sekaligus mempengaruhi kebijakan gender di parlemen .

6. Kesenjangan Penelitian

Walaupun banyak literatur membahas definisi, prevalensi, dan framing GBV, masih sedikit studi longitudinal yang membandingkan dampak framing media tradisional versus digital dalam konteks politik, serta analisis algoritmik pada platform daring yang menyeleksi liputan GBV.

C. Basis Politik

Temuan utama dan tinjauan pustaka tentang basis politik dalam studi representasi media terhadap kekerasan gender. Secara umum, literatur menyoroti (1) kerangka teori politik yang menjelaskan bagaimana kekuasaan gender dipolitisasi melalui narasi media, (2) pola pemberitaan terhadap politisi kaum perempuan dan korban kekerasan, (3) efek framing media pada partisipasi politik, serta (4) perbedaan dinamika representasi di media tradisional versus digital. Berikut detailnya:

1. Kerangka Teoritis Politik

Teori framing politik Entman menegaskan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, melainkan memilih aspek-aspek tertentu sebagai contoh, apakah kekerasan gender dipandang sebagai isu kriminal murni atau masalah sistemik yang kemudian membentuk agenda publik dan kebijakan ([Oxford Academic][1]). Van Dijk menambahkan dimensi kognisi sosial politik, yaitu bagaimana kerangka pikir kolektif audiens tentang gender dan kekuasaan dipengaruhi oleh struktur teks media, termasuk pilihan leksikal dan urutan narasi ([PMC][2]). Di ranah politik, Krook & Restrepo Sanin (2016) menunjukkan bahwa politisi kaum perempuan kerap menjadi sasaran kekerasan gender bermuatan partisan media menyorot aspek seksual dan personal secara sensasional untuk melemahkan kredibilitas para aktor terkait ([Perpustakaan FES][3]).

2. Pola Pemberitaan Terhadap Korban dan Pelaku

Meta-analisis oleh Djerf-Pierre et al. (2021) mengungkap perbedaan gender dalam liputan kekerasan politik: media cenderung menampilkan politisi kaum perempuan korban kekerasan lebih sering sebagai “figur emosional” dan jarang menyorot konteks kekuasaan yang melingkupi tindak kekerasan tersebut ([Oxford Academic][1]). Studi Journalists’ Resource (2024) menegaskan bahwa liputan media tradisional sering kali menyangkal dimensi politik kekerasan gender, malah memosisikan sebagai “drama pribadi”, sementara media digital membuka ruang diskusi politik, meski juga rentan misinformasi dan ujaran kebencian ([The Journalist's Resource][4]).

3. Efek Framing pada Partisipasi Politik

Penelitian oleh Eveland & Shah (2003) menunjukkan bahwa *framing* sensasional terhadap kekerasan gender di ruang publik menurunkan kepercayaan politik warga khususnya Perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik, karena para aktor terkait merasa media tidak mewakili suara para aktor terkait secara adil ([Oxford Academic][5]). Analisis OSCE (2023) menggarisbawahi bahwa ketika media menggambarkan kekerasan gender sebagai isu privat, fenomena ini melemahkan tekanan publik untuk reformasi kebijakan proteksi korban di tingkat legislatif ([osce.org][6]).

4. Tradisional vs. Digital: Dinamika Representasi

Dalam media konvensional (koran, televisi), editorial terpusat memungkinkan bias afiliasi politik lebih mudah terproyeksi, sehingga pemberitaan sering seragam dan lambat merespons isu

kekerasan gender yang baru ([Neliti][7]). Sebaliknya, platform digital—seperti portal berita dan media sosial—memberi ruang partisipasi publik dan aktivisme digital, tetapi algoritma cenderung mempromosikan konten sensasional, sehingga kasus-kasus ekstrem mendapatkan liputan berlebihan sedangkan narasi sistemik justru terpinggirkan ([Konde.co][8]).

METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana media merepresentasikan kekerasan gender dalam konteks politik, khususnya terhadap tokoh kaum perempuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji makna-makna yang terkandung dalam teks berita serta bagaimana media membingkai (framing) isu kekerasan gender dalam ruang politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan analisis wacana media. Studi ini menganalisis pemberitaan dari media daring yang membahas kekerasan gender yang dialami oleh kaum perempuan dalam dunia politik, baik berupa kekerasan verbal, simbolik, maupun struktural. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengungkap pola naratif dan konstruksi wacana yang ditampilkan media terhadap peran dan posisi kaum perempuan dalam ranah politik.

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif seperti yang digunakan dalam tulisan ini, populasi tidak didefinisikan secara statistik, melainkan sebagai seluruh sumber data yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diteliti, yaitu representasi kekerasan gender terhadap kaum perempuan dalam politik melalui media massa daring. Populasi dalam makalah ini mencakup seluruh artikel berita dari media daring nasional yang memuat isu kekerasan gender terhadap kaum perempuan politisi, khususnya pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Media yang menjadi fokus populasi adalah media dengan jangkauan luas dan kredibilitas tinggi, seperti Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tempo.co.

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah representasi kekerasan gender dalam media massa yang melibatkan tokoh-tokoh politik kaum perempuan. Lokasi penelitian bersifat wawancara terhadap masyarakat, yaitu lingkungan Masyarakat maupun tokoh-tokoh Masyarakat dan penelitian lebih mendalam melalui media daring (online) seperti kompas.com, detik.com, dan tempo.co. Pemilihan media yang didasarkan pada jangkauan nasional, popularitas, serta frekuensi pemberitaan isu politik dan gender.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Tulisan ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari dokumen dan teks pemberitaan media daring. Sumber data terbagi menjadi dua kategori:

Sumber primer: Artikel berita dari media massa daring seperti Kompas.com, Detik.com, dan CNNIndonesia.com yang memuat pemberitaan tentang kekerasan berbasis gender terhadap tokoh politik kaum perempuan. Berita yang dikumpulkan dipilih berdasarkan relevansi dengan tema kekerasan gender dalam konteks politik, serta dipublikasikan dalam kurun waktu tertentu (sebagai contoh 2020–2024).

Sumber sekunder: Literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi masyarakat sipil (sebagai contoh Komnas Perempuan), serta dokumen hukum yang terkait (seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Pemilu).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri, mengunduh, dan menyeleksi teks-teks berita yang relevan. Pemilihan artikel dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti tokoh yang diberitakan, jenis kekerasan yang ditampilkan, dan sudut pandang media dalam membingkai kasus tersebut

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Dokumen yang dimaksud berupa artikel berita dari media massa daring nasional yang memuat pemberitaan mengenai kekerasan gender terhadap kaum perempuan dalam dunia politik. Artikel-artikel tersebut dikumpulkan dari platform media seperti Kompas.com, Detik.com, CNNIndonesia.com, dan Tempo.co, yang secara rutin memberitakan isu-isu sosial-politik, termasuk dinamika gender dalam ruang kekuasaan. Pengumpulan dilakukan dengan menelusuri arsip berita menggunakan kata kunci tertentu seperti “pelecehan terhadap politisi kaum perempuan,” “kekerasan gender dalam politik,” “diskriminasi kaum perempuan di parlemen,” dan istilah lain yang relevan. Hasil pencarian kemudian diseleksi secara purposif, yakni hanya berita yang memenuhi kriteria spesifik—seperti menampilkan tokoh kaum perempuan dalam politik sebagai korban kekerasan atau diskriminasi, menyoroti dimensi kekerasan verbal, simbolik, maupun struktural, dan dipublikasikan dalam rentang waktu 2020–2024—yang dijadikan data. Selain berita daring, data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah dan laporan kelembagaan, seperti jurnal akademik, buku teori media dan gender, serta dokumen dari lembaga seperti Komnas Perempuan, LBH APIK, dan UN Women. Literatur ini digunakan untuk memperkaya pemahaman teoritis sekaligus menguatkan interpretasi terhadap temuan dalam teks media. Melalui

teknik ini, makalah berupaya menangkap secara mendalam bagaimana media membentuk representasi atas kekerasan gender yang dialami kaum perempuan di ruang politik dan sejauh mana media memperkuat atau justru melawan bias gender dalam penyajian wacana publik.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam tulisan ini, penulis menggunakan strategi triangulasi sumber dan pemeriksaan kredibilitas konten. Dua langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis valid, relevan, dan tidak bias.

• Triangulasi Sumber

Penulis membandingkan berita dari beberapa media daring yang berbeda, seperti Kompas.com, Detik.com, dan CNNIndonesia.com, guna melihat perbedaan sudut pandang atau framing yang digunakan dalam memberitakan kasus kekerasan gender dalam politik. Hal ini bertujuan untuk menghindari interpretasi yang hanya berasal dari satu perspektif media.

• Kredibilitas dan Relevansi Konten

Setiap berita yang dipilih dianalisis berdasarkan kredibilitas media, kelengkapan informasi, dan kesesuaian dengan topik makalah. Artikel yang memuat opini tanpa fakta yang kuat atau yang menampilkan bias berlebihan dieliminasi dari analisis.

• Konsistensi dengan Literatur Akademik

Temuan dari media juga dikonfirmasi dengan literatur akademik atau laporan dari lembaga terpercaya seperti Komnas Perempuan, SAFEnet, atau UN Women, untuk melihat sejauh mana data media sejalan dengan kajian ilmiah dan realitas sosial yang lebih luas.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Studi di Indonesia: Representasi media terhadap kekerasan gender dalam basis politik, Penelitian dan analisis media di Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender—terutama yang dialami oleh kaum perempuan dalam ranah politik—bukan hanya terjadi secara fisik atau verbal, tetapi juga melalui simbol-simbol dan narasi dalam pemberitaan media. Media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan persepsi sosial, termasuk dalam menormalisasi atau menolak kekerasan gender. Berikut beberapa temuan dan studi utama:

1. Representasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Media Arus Utama

Studi Kasus: Analisis Wacana Kritis Berita KDRT di Suara.com
(Studi oleh Aulia Rahma – Universitas Airlangga)

Pendekatan: Menggunakan Analisis Wacana Sara Mills untuk meneliti bagaimana media menempatkan subjek dan objek dalam narasi KDRT.

Temuan: Temuan utama dalam sejumlah berita terkait kekerasan rumah tangga (KDRT) maupun pelecehan seksual menunjukkan adanya kecenderungan media arus utama untuk meminimalisasi tanggung jawab pelaku. Ini dapat dilihat dari pilihan bahasa seperti:

Pelaku KDRT sering kali tidak disorot secara kritis; narasi lebih menitikberatkan pada kondisi korban secara emosional.

Framing menyudutkan kaum perempuan dengan cara melabeli para aktor terkait sebagai penyebab konflik atau “istri cerewet” yang memancing kekerasan.

Media membentuk stereotip kaum perempuan sebagai makhluk emosional dan pasif, sementara laki-laki digambarkan sebagai kehilangan kendali.

Implikasi politik: Ketika kekerasan berbasis gender tidak dikritisi secara struktural, media secara tidak langsung mendukung sistem patriarki yang juga berakar dalam politik dan kebijakan domestik.

Dampaknya:

Membentuk persepsi publik bahwa kekerasan terhadap kaum perempuan adalah hasil dari "kesalahan kecil" atau "kelalaian rumah tangga".

Mengaburkan fakta bahwa banyak kekerasan gender merupakan bentuk dominasi struktural dan ketimpangan kuasa.

2. Framing Kasus Kekerasan Seksual oleh Tirto.id: Perspektif Kritik Sosial

Studi Kasus: Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual dalam Media Progresif

Media: Tirto.id sebagai contoh media alternatif yang cenderung menggunakan pendekatan kritik sosial struktural.

Temuan: Tirto.id menyajikan narasi yang memperlihatkan kegagalan negara dalam melindungi korban dan menegakkan hukum yang berpihak pada korban. Menggunakan istilah seperti “budaya patriarki”, “kekerasan simbolik”, dan “impunitas sistemik” untuk menjelaskan konteks kekerasan.

Fokus pada suara korban: beberapa artikel menampilkan testimoni, kutipan langsung, dan sudut pandang aktivis kaum perempuan. Perbedaan signifikan dengan media arus utama: lebih menonjolkan struktur dan sistem, bukan hanya kejadian individual.

Konteks politik: Narasi ini memperkuat dorongan akan pentingnya reformasi kebijakan berbasis gender dan advokasi legislasi (seperti RUU TPKS).

3. Representasi Politisi Perempuan dalam Pemberitaan Politik

Studi Kasus: Framing Terhadap Puan Maharani dan Tri Rismaharini di VOA & Media Indonesia (Studi oleh Nia Sari, dkk.)

Fokus: Menganalisis bagaimana media memperlakukan kaum perempuan yang memegang jabatan politik tinggi.

Temuan: Politisi kaum perempuan sering disorot berdasarkan emosi dan gaya kepemimpinan, bukan kebijakan atau kapabilitas. Puan Maharani dipersepsikan sebagai “tidak cukup kuat” dan “kurang vokal”, sementara Tri Rismaharini digambarkan emosional dan tidak rasional dalam beberapa pemberitaan. Media menggunakan kata-kata yang melemahkan otoritas, sebagai contoh "marah-marah", "menangis", "tersinggung"—kata yang jarang digunakan untuk politisi laki-laki.

Dampak: Persepsi ini membentuk opini publik bahwa kaum perempuan kurang cocok dalam dunia politik yang keras dan rasional, memperkuat gender gap dalam partisipasi politik.

4. Media dan Kekerasan Seksual di Dunia Kedokteran

Studi Kasus: Kasus Pelecehan Seksual oleh Dokter Kandungan di Garut

Fokus media: Penekanan pada aspek drama dan sensasi viral daripada kedalaman narasi korban.

Temuan:

Korban hanya disebut sebagai objek; tidak diberi ruang suara atau pemulihan psikologis dalam pemberitaan.

Berita lebih fokus pada prosedur hukum dan opini masyarakat daripada trauma recovery.

Banyak media daring menampilkan foto pelaku, bahkan tanpa sensor, namun tetap tidak menempatkan korban sebagai subjek utama pemberitaan.

Analisis: Ini menunjukkan media belum siap menjadi bagian dari keadilan transformatif. Kekerasan seksual direpresentasikan sebagai insiden hukum, bukan sebagai bagian dari kekerasan sistemik berbasis gender, yang seharusnya menjadi isu politik.

5. Kekerasan Gender Simbolik dalam Pemilu dan Kampanye

Contoh: Kampanye Politik dan Seksisme Terselubung

Temuan Umum:

Banyak kandidat kaum perempuan dalam pemilu dilecehkan secara simbolik melalui media sosial dan media lokal, seperti menyebarkan foto editan, komentar tentang tubuh, atau rumor rumah tangga.

Beberapa media lokal menyoroti isu pribadi (pernikahan, keperawanan, penampilan) lebih dari platform politik kandidat kaum perempuan.

Contoh nyata:

Seorang caleg kaum perempuan di Jawa Timur mendapat berita yang memfokuskan pada “penampilannya yang cantik namun terlalu muda,” bukan pada visi-misinya.

Konteks politik:

Menunjukkan bagaimana media sering kali menjadi alat untuk delegitimasi politisi kaum perempuan, terutama melalui narasi yang mengalihkan isu ke ranah domestik dan fisik.

Tabel 1.1 Parsial untuk Studi Indonesia

Tema	Pola Representasi	Akibat Politik
Kekerasan Rumah Tangga	Korban distigmatisasi; pelaku dilunakkan	Normalisasi kekerasan di ranah domestik
Kekerasan Seksual	Narasi hukum dominan; minim suara korban	Mengaburkan konteks struktural dan pengaruh kebijakan
Politisi Perempuan	Fokus pada emosi & domestikasi	Reduksi legitimasi politik perempuan
Kekerasan Simbolik	Body-shaming, rumor, komentar seksis	Penurunan elektabilitas & partisipasi politik perempuan

Tabel 1.2 REKAP: Pola Umum dalam Temuan Media Indonesia

Aspek	Media Arus Utama	Media Progresif	Dampak Jangka Panjang
Representasi Korban	Pasif, tidak berdaya	Aktif, memiliki suara	Korban sulit mendapatkan keadilan sosial
Representasi Pelaku	"Khilaf", "stres", tidak jahat	Diungkap dalam konteks struktural	Pelaku mendapat empati sosial
Politisi Perempuan	Dirusak dengan bahasa & visual	Dikenalkan sebagai pemimpin rasional	Menghambat partisipasi politik perempuan
Framing Kasus	Individual, sensational	Kritis dan sistemik	Publik gagal paham akar masalah
Kekerasan Simbolik	Tidak dikritisi	Dibongkar dan dijelaskan	Kekerasan non-fisik terus berulang

PEMBAHASAN

Media massa memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik dan memproduksi pengetahuan sosial-politik, termasuk dalam hal kekerasan berbasis gender. Ketika kekerasan gender terjadi dalam konteks politik—baik terhadap politisi kaum perempuan, aktivis, maupun warga yang

terlibat dalam aksi politik—media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk narasi dominan. Sayangnya, representasi media terhadap isu ini sering kali bias, mengandung stereotip gender, serta gagal menangkap kompleksitas kekerasan gender dalam lanskap politik yang patriarkal. Menurut Bourdieu (2001), kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang tidak selalu eksplisit, tetapi tertanam dalam struktur sosial dan budaya, sehingga tampak wajar. Kekerasan simbolik dalam politik ditujukan untuk membuat kaum perempuan merasa tidak pantas atau tidak layak berada dalam posisi kekuasaan. Misalnya, saat seorang politisi kaum perempuan disorot karena cara berpakaian, bukan argumen politiknya, maka hal itu merupakan bentuk kekerasan simbolik yang mengarahkan fokus publik pada gender, bukan kompetensi.

Fenomena ini bisa dilihat dalam kasus-kasus di Indonesia. Politisi seperti Puan Maharani kerap kali dijadikan objek meme yang merendahkan secara visual, yang mengolok-olok ekspresi wajah atau pakaian, sesuatu yang jarang terjadi pada politisi laki-laki. Grace Natalie, mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sering menjadi target ujaran kebencian berbasis gender di media sosial, termasuk tuduhan bahwa dia naik jabatan karena kecantikan, bukan kapabilitas.

Dalam kasus semacam ini, tubuh kaum perempuan menjadi medan pertarungan politik itu sendiri—sebuah wacana yang telah lama dikritik dalam teori feminis post-strukturalis (Butler, 1990).

Kekerasan Gender dalam Konteks Politik

Kekerasan gender berbasis politik mengacu pada segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengintimidasi, mendiskriminasi, atau membungkam partisipasi politik seseorang karena identitas gendernya, khususnya kaum perempuan. Menurut Krook (2020), kekerasan politik berbasis gender adalah bentuk pembungkaman terhadap aktor kaum perempuan dalam politik yang muncul dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga simbolik.

Dalam konteks Indonesia, politisi kaum perempuan sering menjadi sasaran pelecehan, ujaran kebencian, bahkan serangan digital yang berlandaskan pada identitas gender para aktor terkait, bukan pada argumen politik yang para aktor terkait ajukan. Fenomena ini kerap diperkuat oleh representasi media yang tidak netral dan tidak berperspektif gender.

Mona Lena Krook (2020), dalam karyanya *Violence Against Women in Politics*, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap kaum perempuan dalam politik adalah segala tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, membatasi, atau menghentikan partisipasi politik kaum perempuan secara langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan kekerasan fisik, psikologis, verbal, atau simbolik. Krook menekankan bahwa bentuk-bentuk kekerasan ini bukan insidental, tetapi sistematis dan berakar dari keinginan untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam ruang kekuasaan.

Secara umum, kekerasan gender berbasis politik (KGBP) mencakup:

- Kekerasan Fisik, seperti penyerangan terhadap politisi kaum perempuan selama kampanye atau saat menjabat.
- Kekerasan Verbal, sebagai contoh ujaran seksis atau misoginis di parlemen maupun media.
- Kekerasan Simbolik, yakni penggunaan stereotip gender untuk mendiskreditkan kaum perempuan.

Kekerasan Psikologis, termasuk intimidasi, ancaman, dan pelecehan emosional. Kekerasan Digital, yang berkembang pesat melalui media sosial berupa doxing, ancaman pemerkosaan, dan pelecehan daring.

Menurut Bourdieu (2001), kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang tidak selalu eksplisit, tetapi tertanam dalam struktur sosial dan budaya, sehingga tampak wajar. Kekerasan simbolik dalam politik ditujukan untuk membuat kaum perempuan merasa tidak pantas atau tidak layak berada dalam posisi kekuasaan. Misalnya, saat seorang politisi kaum perempuan disorot karena cara berpakaian, bukan argumen politiknya, maka hal itu merupakan bentuk kekerasan simbolik yang mengarahkan fokus publik pada gender, bukan kompetensi.

Fenomena ini bisa dilihat dalam kasus-kasus di Indonesia. Politisi seperti Puan Maharani kerap kali dijadikan objek meme yang merendahkan secara visual, yang mengolok-olok ekspresi wajah atau pakaian, sesuatu yang jarang terjadi pada politisi laki-laki. Grace Natalie, mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sering menjadi target ujaran kebencian berbasis gender di media sosial, termasuk tuduhan bahwa dia naik jabatan karena kecantikan, bukan kapabilitas. Dalam kasus semacam ini, tubuh kaum perempuan menjadi medan pertarungan politik itu sendiri—sebuah wacana yang telah lama dikritik dalam teori feminis post-strukturalis (Butler, 1990).

Representasi Media dan Bias Gender

Media konvensional maupun digital sering kali menggambarkan kaum perempuan politisi dalam bingkai yang bias, seperti menyoroti aspek penampilan fisik, status pernikahan, atau emosi pribadi ketimbang kapasitas intelektual dan agenda politiknya. Ini mencerminkan apa yang disebut oleh Gaye Tuchman (1978) sebagai "symbolic annihilation" atau penghapusan simbolik terhadap kaum perempuan melalui representasi yang merendahkan atau tidak proporsional.

Di Indonesia, penelitian oleh Saraswati (2021) menunjukkan bahwa pemberitaan media arus utama masih banyak yang mereproduksi stereotip gender terhadap kaum perempuan politisi, sebagai contoh dengan memberi judul berita yang seksis atau menggambarkan kekerasan verbal terhadap kaum perempuan sebagai hal yang "wajar" dalam politik yang keras. Representasi semacam ini tidak hanya mencerminkan norma patriarkal, tetapi juga memperkuatnya dalam kesadaran publik. Jurnalisme politik masih banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin: kompetisi, kekuasaan, agresivitas, dan rasionalitas (Ross, 2017). Nilai-nilai ini juga tercermin dalam praktik jurnalistik yang memberi ruang besar kepada

politisi laki-laki, baik dalam hal kuota berita, kutipan langsung, maupun narasi kepemimpinan. Sebaliknya, kaum perempuan dalam politik sering kali tidak dinilai berdasarkan kapabilitas politik, tetapi melalui dimensi non-politik: penampilan fisik, status pernikahan, keibuan, atau moralitas.

Penelitian oleh Maria Saraswati (2021) terhadap representasi media terhadap politisi kaum perempuan di Indonesia menemukan bahwa mayoritas pemberitaan masih menempatkan kaum perempuan dalam narasi sensasional, seperti skandal, hubungan asmara, atau penampilan. Dalam banyak kasus, keberhasilan politisi kaum perempuan direduksi menjadi isu nepotisme atau “naik karena privilese,” bukan hasil perjuangan politik. Hal ini menunjukkan bahwa media masih beroperasi dalam kerangka patriarki simbolik.

Bentuk representasi media terhadap politisi kaum perempuan dalam konteks kekerasan gender mencakup:

- Pemberitaan Seksis

Media sering kali membingkai pemberitaan dengan menyoroti aspek-aspek yang tidak relevan secara politik: gaya berpakaian, bentuk tubuh, warna lipstik, atau ekspresi wajah. Dalam studi Ross & Comrie (2012), ditemukan bahwa lebih dari 60% pemberitaan politisi kaum perempuan mencantumkan deskripsi fisik, sementara hanya 15% untuk politisi laki-laki.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat saat media memfokuskan pemberitaan pada “pakaian terbuka” politisi kaum perempuan atau gaya busana saat kampanye, bukan substansi visi dan programnya. Ini merupakan bentuk kekerasan simbolik yang bertujuan mereduksi nilai politik kaum perempuan ke dalam tubuh dan visual semata.

- Stigmatisasi Moral

Perempuan yang vokal dalam politik sering kali distigma sebagai “tidak sopan”, “kasar”, atau “melawan kodrat.” Dalam beberapa kasus, kaum perempuan yang tampil tegas dianggap arogan, sementara sikap yang sama pada laki-laki dianggap kepemimpinan. Framing moral ini menjadikan kaum perempuan sebagai objek kontrol sosial yang dilegitimasi oleh media.

Puan Maharani, sebagai contoh, kerap kali diberitakan dengan narasi negatif terkait gaya kepemimpinannya di DPR, seperti “dingin”, “otoriter”, atau “tidak simpatik”. Media lebih memilih mengangkat narasi emosional dibanding substansi kinerjanya sebagai Ketua DPR.

- Narasi Privilese

Media juga sering kali mereproduksi narasi bahwa keberhasilan politisi kaum perempuan semata-mata karena jaringan keluarga atau warisan politik. Sementara laki-laki dengan latar belakang serupa jarang mendapat stigmatisasi yang sama. Ini menunjukkan bias struktural media dalam menghargai pencapaian politik berdasarkan gender.

.Kekerasan Digital dan Peran Media Sosial

Dengan maraknya media sosial, kekerasan gender dalam politik juga bermigrasi ke ruang digital. Politisi kaum perempuan seperti Najwa Shihab atau Grace Natalie, sebagai contoh, menjadi sasaran ujaran kebencian dan pelecehan seksual daring. Sayangnya, alih-alih menjadi ruang pemberdayaan, media sosial kerap digunakan untuk mendistribusikan kekerasan berbasis gender.

Menurut laporan dari UN Women (2021), kekerasan berbasis gender secara daring semakin meningkat terutama saat kaum perempuan aktif dalam kampanye politik atau advokasi publik. Namun media sering kali tidak mengangkat kekerasan ini sebagai isu struktural, melainkan insidental, bahkan kadang-kadang menyalahkan korban. media sosial telah menjadi ruang baru bagi partisipasi politik dan ekspresi diri. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok, membuka kemungkinan bagi semua warga, termasuk kaum perempuan, untuk menyuarakan pendapat, memperluas jaringan, dan terlibat dalam diskursus politik. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula fenomena kekerasan berbasis gender yang menasar kaum perempuan, khususnya para aktor terkait yang aktif dalam dunia politik. Kekerasan ini terjadi dalam bentuk digital, mulai dari pelecehan daring, doxing, trolling, hingga disinformasi seksual yang sistematis.

Poin ini membahas bagaimana kekerasan digital menjadi bentuk baru dari kekerasan gender dalam politik, bagaimana media sosial memainkan peran ambivalen sebagai ruang emansipasi sekaligus represi, dan bagaimana aktor-aktor kaum perempuan menghadapi serta mengartikulasikan perlawanan terhadap kekerasan tersebut. Dengan pendekatan akademik berbasis teori dan studi kasus, pembahasan ini bertujuan mengungkap hubungan kompleks antara media sosial, kekuasaan simbolik, dan perjuangan gender dalam ruang publik digital-politik.

Menurut definisi UN Women (2021), kekerasan digital berbasis gender (KDBG) adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan bantuan teknologi komunikasi yang ditujukan untuk menyakiti, mengintimidasi, mempermalukan, atau mengontrol kaum perempuan. Bentuk KDBG dalam konteks politik mencakup:

- Doxing: penyebaran informasi pribadi secara daring (alamat rumah, nomor telepon, dll) untuk mengintimidasi.
- Cyberstalking: pengawasan atau penguntitan digital secara terus-menerus.
- Pelecehan seksual daring: pesan, gambar, atau video berisi unsur seksual yang tidak diinginkan.
- Disinformasi seksual: penyebaran hoaks ya

Kasus Indonesia: Kekerasan Digital terhadap Politisi Perempuan

- Najwa Shihab

Meskipun bukan politisi, Najwa Shihab adalah figur publik yang kerap berinteraksi langsung dengan politisi dan agenda politik. Ia sering kali menjadi sasaran ujaran kebencian berbasis gender. Ketika

mengkritik penanganan pandemi oleh DPR, media sosial dipenuhi dengan meme-meme seksis, sindiran fisik, hingga ancaman kekerasan seksual. Serangan ini tidak fokus pada argumennya, tetapi pada identitas gendernya.

- Tsamara Amany

Sebagai mantan politisi muda dari PSI, Tsamara menjadi simbol kaum perempuan muda di politik. Namun, kehadirannya justru memicu gelombang pelecehan digital. Akun-akun anonim menyerangnya dengan foto vulgar, disinformasi bahwa ia “ditunggangi elite,” dan pelecehan personal yang tidak dialami politisi laki-laki. Dalam beberapa wawancara, Tsamara menyatakan bahwa tekanan digital adalah salah satu alasan mengapa ia keluar dari partai politik.

- Puan Maharani

Puan sebagai Ketua DPR RI sering menjadi sasaran serangan digital yang menasar aspek gender dan keturunannya. Meme yang memperolok cara bicaranya, wajahnya, bahkan silsilah keluarganya beredar luas di Twitter dan Facebook. Kritik terhadap kebijakannya bercampur dengan ujaran seksis yang melecehkan, menunjukkan bagaimana kritik politik dan kekerasan gender menjadi kabur dalam ruang digital.

Sebagian besar platform media sosial seperti X (Twitter), Facebook, dan Instagram tidak memiliki sistem yang kuat untuk menangani KDBG. Meskipun tersedia fitur pelaporan, banyak laporan kekerasan gender digital tidak ditindaklanjuti dengan serius. Studi dari Feminist Internet (2022) menyatakan bahwa mayoritas laporan pelecehan online terhadap kaum perempuan politisi tidak menghasilkan tindakan nyata dari pihak platform.

Faktor-faktor yang memperburuk kondisi ini antara lain:

- Algoritma yang mengutamakan keterlibatan (engagement), bukan keamanan.
- Ketidajelasan definisi “ujaran kebencian” terhadap kaum perempuan.
- Budaya moderator yang bias dan tidak terlatih dalam memahami dinamika gender.

Selain itu, banyak akun penyebar kekerasan digital beroperasi secara anonim, bahkan sistematis (bot, buzzer). Ini memperkuat struktur kekerasan, menjadikannya bukan hanya ekspresi individu, tetapi bagian dari strategi politik tertentu.

Peran Media Alternatif dan Jurnalisme Feminis

Sebagai respons terhadap bias media arus utama, muncul media alternatif dan jurnalisme feminis yang berupaya merepresentasikan kekerasan gender dalam politik secara lebih adil dan kritis. Media seperti Magdalene.co, Konde.co, atau Project Multatuli menampilkan narasi yang berfokus pada pengalaman kaum perempuan, analisis struktural, serta advokasi perubahan kebijakan.

Menurut Mendes, Ringrose, & Keller (2019), media feminis dan aktivisme digital memiliki potensi untuk menantang narasi dominan dan membentuk ruang kontra-publik tempat kekerasan terhadap kaum perempuan tidak lagi disenyapkan. Dalam menghadapi arus kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks, kaum perempuan tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi agen perlawanan aktif melalui berbagai bentuk aktivisme digital. Aktivisme digital feminis muncul sebagai strategi baru dalam merebut ruang publik, menantang narasi patriarkal, dan membangun solidaritas lintas kelas, ras, dan wilayah geografis. Dalam konteks politik, aktivisme ini menjadi semakin signifikan karena menyentuh akar kekuasaan dan pengambilan keputusan yang selama ini didominasi oleh maskulinitas hegemonik.

Tulisan ini akan membahas bagaimana aktivisme digital feminis berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan gender dalam politik yang dimediasi oleh media, baik konvensional maupun sosial. Dengan menggunakan perspektif interseksionalitas dan teori media baru, analisis ini menelusuri bentuk, strategi, tantangan, dan dampak dari aktivisme digital feminis, serta bagaimana ia mereformulasi demokrasi digital menjadi lebih inklusif dan adil gender.

Aktivisme digital feminis merujuk pada penggunaan teknologi digital—termasuk media sosial, blog, podcast, dan platform online lainnya—untuk mempromosikan agenda keadilan gender, memerangi kekerasan, serta membangun kesadaran kolektif terhadap ketimpangan gender (Mendes, Ringrose, & Keller, 2019). Aktivisme ini tidak hanya reaktif terhadap kasus tertentu, tetapi juga proaktif dalam membangun narasi alternatif, menyediakan edukasi digital, dan mengorganisir gerakan sosial.

Ciri khas dari aktivisme digital feminis adalah:

- Jaringan terdesentralisasi: tidak bergantung pada pemimpin tunggal atau institusi formal.
- Kreativitas komunikatif: memanfaatkan meme, video pendek, cuitan, thread edukatif, hingga bentuk partisipatif seperti tagar (#).
- Aksesibilitas luas: memungkinkan siapa pun untuk terlibat, bahkan dari daerah yang secara geografis terpinggirkan.

Dengan kata lain, aktivisme digital feminis merepresentasikan “feminisme jaringan” yang mengandalkan partisipasi horizontal dan kekuatan kolektif (Baer, 2016).

Media arus utama masih sering mereproduksi kekerasan simbolik terhadap kaum perempuan melalui pemilihan diksi yang seksis, penggambaran yang stereotipikal, dan framing berita yang bias gender. Dalam konteks politik, politisi kaum perempuan sering diberitakan berdasarkan aspek-aspek non-substansial seperti penampilan fisik, status keluarga, atau kehidupan pribadi, alih-alih kinerja atau gagasan politiknya.

Aktivisme digital feminis muncul untuk mengoreksi dan menantang framing tersebut. Misalnya:

- Fact-checking kolektif terhadap berita misoginis yang menyudutkan kaum perempuan politisi.

- Kampanye boikot media yang memuat konten seksis atau memberi panggung kepada pelaku kekerasan.
- Petisi daring agar media meminta maaf atau mengubah praktik redaksionalnya.

Contoh konkret adalah gerakan publik yang mengecam media karena menyebut korban pelecehan seksual sebagai “kaum perempuan penggoda,” dan memaksa media tersebut merevisi judul serta kontennya. Penggunaan tagar (hashtag) adalah salah satu taktik utama aktivisme digital feminis. Tagar bukan sekadar alat pelabelan, tetapi merupakan bentuk artikulasi politik yang mampu membangun solidaritas, visibilitas, dan tekanan terhadap kekuasaan. Beberapa tagar penting dalam konteks kekerasan gender dalam politik:

a. #MeToo dan #UsToo

Tagar ini bukan hanya mengungkap pengalaman kekerasan seksual, tetapi juga menyoroti bagaimana kaum perempuan yang bersuara sering diintimidasi, diserang balik, dan dikucilkan dari dunia politik.

b. #PerempuanBersuara

Digunakan oleh aktivis dan warga biasa untuk merespons pelabelan kaum perempuan kritis sebagai "tidak sopan," "tidak tahu tempat," atau "melawan kodrat." Tagar ini menjadi ruang simbolik untuk mengafirmasi hak kaum perempuan dalam menyuarakan ketidakadilan.

c. #SahkanRUUPKS dan #SahkanRUUPRPD

Aktivisme digital juga mendorong advokasi kebijakan. Tagar ini berhasil mengangkat wacana pengesahan RUU Perlindungan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sebelumnya stagnan di DPR, menunjukkan kekuatan tekanan publik digital.

Tagar-tagar ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial bisa digunakan untuk mengintervensi ruang politik formal dari luar, bahkan tanpa kehadiran langsung di parlemen.

SIMPULAN

Di zaman sekarang, media—baik televisi, surat kabar, maupun media sosial—memegang peran penting dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Namun, sayangnya, media tidak selalu bersikap adil, terutama dalam memperlihatkan kaum perempuan yang terlibat dalam dunia politik. Seringkali, media menunjukkan kaum perempuan politisi dengan cara yang tidak menyenangkan, merendahkan, atau bahkan menyudutkan para aktor terkait. Hal ini termasuk bagian dari yang disebut “kekerasan gender” di media.

Kekerasan gender berarti perlakuan yang tidak adil, menyakitkan, atau merendahkan yang dialami seseorang hanya karena jenis kelaminnya—dan dalam banyak kasus, fenomena ini dialami oleh

kaum perempuan. Dalam dunia politik, bentuk kekerasan ini bisa muncul ketika seorang kaum perempuan dihina karena pakaiannya, bentuk tubuhnya, atau karena dia dianggap tidak pantas memimpin hanya karena dia bukan laki-laki. Media bisa ikut menyebarkan perlakuan ini dengan menyampaikan berita yang tidak adil, penuh prasangka, atau bahkan bernada menghina.

- **Media Arus Utama dan Cara Mereka Memberitakan Perempuan**

Media arus utama seperti televisi atau surat kabar masih sangat berpengaruh. Tapi, dalam banyak kasus, media ini tidak memperlihatkan kaum perempuan politisi sebagai sosok yang kuat dan cerdas. Sebaliknya, para aktor terkait sering menunjukkan kaum perempuan dari sisi penampilan fisiknya, status pernikahan, atau bahkan gosip kehidupan pribadinya. Misalnya, seorang politisi kaum perempuan yang sebenarnya punya ide cemerlang untuk membangun negara malah lebih banyak diberitakan tentang siapa suaminya, atau bagaimana ia berpakaian.

Ini membuat masyarakat tidak melihat kemampuan kaum perempuan secara utuh, dan terus memelihara pandangan bahwa politik hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, media sering memakai bahasa yang kasar atau menyindir untuk menggambarkan kaum perempuan yang vokal di dunia politik, seperti menyebut para aktor terkait “galak”, “tidak tahu malu”, atau “melawan kodrat”.

- **Kekerasan Gender di Media Sosial**

Selain media arus utama, media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook juga sering menjadi tempat terjadinya kekerasan gender. Perempuan yang aktif menyuarakan pendapatnya di dunia politik sering dihina, dirundung (dibully), atau bahkan diancam. Misalnya, ada yang menerima komentar jahat hanya karena para aktor terkait berani mengkritik pemerintah atau membahas isu kaum perempuan.

Jenis kekerasan di media sosial sangat beragam. Ada yang disebut body shaming, yaitu mengejek bentuk tubuh. Ada juga yang menyebarkan foto pribadi tanpa izin, membuat meme jahat, atau menyebarkan berita palsu (hoaks) untuk menjatuhkan nama kaum perempuan tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena bisa membuat kaum perempuan takut berbicara, bahkan mundur dari dunia politik.

- **Perlawanan Lewat Aktivisme Digital**

Meskipun kaum perempuan sering menjadi korban, para aktor terkait juga tidak tinggal diam. Banyak kaum perempuan dan kelompok feminis (yaitu orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan kaum perempuan) mulai melawan lewat cara yang baru, yaitu aktivisme digital. Aktivisme ini menggunakan internet dan media sosial untuk melawan ketidakadilan, menyuarakan hak, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Contohnya, ketika ada kaum perempuan yang dihina atau dirundung di media, banyak orang membuat kampanye online untuk membelanya. Mereka memakai tagar seperti #PerempuanBersuara,

#SahkanRUUPKS, atau #MeToo agar suara para aktor terkait bisa tersebar luas. Kampanye ini tidak hanya menunjukkan bahwa korban tidak sendirian, namun juga membuat banyak orang sadar tentang pentingnya menghormati kaum perempuan dan menghapus kekerasan gender dari dunia politik.

Beberapa politisi kaum perempuan juga mulai menggunakan akun media sosialnya untuk membela diri, memberikan edukasi, dan memperjuangkan isu penting. Dengan cara ini, para aktor terkait bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat tanpa harus lewat media arus utama yang kadang tidak adil.

- Pentingnya Media yang Adil dan Berpihak pada Kesetaraan

Media sebenarnya punya kekuatan besar. Jika media mau berubah dan mulai memberitakan kaum perempuan dengan adil—menyoroti pemikiran, kerja keras, dan kontribusinya dalam politik—maka pandangan masyarakat juga akan berubah. Media bisa membantu menciptakan citra bahwa kaum perempuan juga mampu menjadi pemimpin, punya gagasan besar, dan layak didengar. Untuk itu, media perlu:

- Memakai bahasa yang adil: Tidak menggunakan kata-kata seksis atau menghina.
- Memilih narasumber kaum perempuan: Agar suara dan pendapat kaum perempuan lebih banyak muncul.
- Tidak memojokkan korban kekerasan: Tapi mendukungnya dan membantu menjelaskan masalahnya.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu kekerasan gender dan bagaimana menghentikannya.
- Selain media, pemerintah juga punya peran penting. Harus ada aturan yang tegas agar media dan pengguna internet tidak seenaknya menyebarkan kebencian kepada kaum perempuan. Jika seseorang menyebarkan hoaks atau melakukan kekerasan digital, maka harus ada sanksi hukum yang jelas.

Harapan ke Depan

Kita semua punya peran untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman dan adil untuk kaum perempuan, terutama dalam politik. Politik adalah tempat di mana keputusan penting dibuat, dan kaum perempuan juga berhak berada di sana. Media harus jadi jembatan yang membantu mewujudkan kesetaraan, bukan malah menghalangi.

Kita juga harus belajar menjadi pengguna media yang bijak. Kalau melihat ada kekerasan terhadap kaum perempuan, jangan diam. Laporkan. Bantu suarakan. Dan jangan ikut-ikutan menyebar hal yang tidak baik. Kita bisa belajar dari gerakan digital yang sudah ada, dan ikut berpartisipasi dalam menyebarkan hal-hal positif.

Penutup

Kesimpulannya, media sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan di dunia politik. Ketika media menunjukkan kaum perempuan secara negatif, maka masyarakat bisa ikut meremehkannya. Tapi ketika media memperlihatkan kaum perempuan sebagai pemimpin yang hebat, masyarakat akan mulai menghormati dan mendukung para aktor terkait.

Meskipun banyak tantangan dan kekerasan yang dihadapi, kaum perempuan tidak menyerah. Dengan bantuan media sosial, para aktor terkait berani melawan, bersuara, dan mengajak lebih banyak orang untuk bergerak bersama. Aktivisme digital feminis telah menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari jari masyarakat akademik—melalui satu unggahan, satu komentar, atau satu kampanye yang menyuarakan keadilan.

Semoga ke depannya, masyarakat akademik bisa melihat media yang lebih adil, politik yang lebih ramah kaum perempuan, dan masyarakat yang semakin menghormati kesetaraan. Karena sesungguhnya, dunia yang adil bukan hanya untuk laki-laki atau kaum perempuan saja, namun untuk masyarakat akademik semua.

DAFTAR PUSTAKA

- World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women.”
- UN Women. (2015). Gender-based Violence: Definition and Scope.”
- Heise, L. (1998). Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290.”
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford University Press.”
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*.”
- Ellsberg, M., et al. (2008). Intimate Partner Violence in the Americas. *Lancet*, 371(9619), 157–166.”
- Garcia-Moreno, C., et al. (2013).”Global and regional estimates of violence against women. WHO.”
- Campbell, J. C. (2002). *Health consequences of intimate partner violence*. *The Lancet*, 359(9314), 1331–1336.”
- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.”
- Van Dijk, T. A. (2013). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan.”
- Jewkes, R. (2010). *Gender Inequities, Relationship Power, and Prevention of HIV*. *PLoS Medicine*.

- Fraser, N. (2014). *Behind Marx's Hidden Abode: For an Expanded Conception of Capitalism*. New Left Review.”
- Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). *Violence Against Women in Politics*. Journal of Democracy, 27(1), 5–17.
- Krook, M. L. (2020). Violence Against Women in Politics. Oxford University Press.”
- Tuchman, G. (1978). *Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media*. Oxford University Press.”
- Saraswati, L. A. (2021). “Representasi Perempuan Politisi dalam Media Arus Utama di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(2), 135–148.”
- UN Women. (2021). Online and ICT-Facilitated Violence Against Women and Girls during COVID-19.”
- Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2019). *Digital Feminist Activism: Girls and Women Fight Back Against Rape Culture*. Oxford University Press.”
- Baer, H. (2016). Redoing feminism: Digital activism, body politics, and neoliberalism. *Feminist Media Studies*.”
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan.”
- SAFE.net. (2023). Laporan Kekerasan Berbasis Gender Online.”
- UN Women. (2021). Guidelines on Gender and ICTs.”
- Keller, J. (2015). *Girls' Feminist Blogging in a Postfeminist Age*. Routledge.
- Earl, J. & Kimport, K. (2011). *Digitally Enabled Social Change*. MIT Press.